

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Profil Kabupaten Kaur

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kaur terletak antara  $103^{\circ}4'8,76''$ - $103^{\circ}46'50,12''$  Bujur Timur dan  $04^{\circ}15'8,21''$ - $04^{\circ}55'27,77''$  Lintang Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Secara administrasi Kabupaten Kaur Berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Bengkulu selatan, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
- 3) Sebelah Barat: Samudera Hindia.
- 4) Sebelah Timur: Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Kaur mempunyai garis pantai sepanjang 89,1723 Km yang memanjang dari perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai ke perbatasan provinsi lampung luas kawasan laut meliputi wilayah seluas lebih kurang 66.059 Ha atau 660,59 Km<sup>2</sup> yang dihitung sejauh 4 mil dari garis pantai. Luas wilayah daratan mencapai 2,556 Km<sup>2</sup> atau 255.600 Ha.

Dari 15 kecamatan dengan 192 desa dan 3 kelurahan yang telah dimekarkan pada tahun 2005 yang lalu, Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Nasal dengan luas 59.937,21 Ha dan Kecamatan paling kecil adalah Kecamatan

K. T. dan luas 2.570,82 Ha seperti pada tabel berikut

**Tabel 2.1**  
**Luas Kabupaten Kaur Menurut Kecamatan tahun 2009**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Ibu Kota Kecamatan
1	Luas	12.849	12	Benua Ratu
2	Semidang Gumay	4.505,9	13	Mentiring
3	Padang Guci Hilir	13.191,87	9	Gunung Kaya
4	Lunggang Kule	2.884,7	9	Sukananti
5	Muara Sahung	29.217,34	7	Ulak Lebar
6	Kelam Tengah	4.063,73	13	Rigangan 1
7	Tetap	9.063,73	12	Tetap
8	Padang Guci Hulu	35.096,80	11	Bungin Tambun II
9	Tanjung Kemuning	7.975,12	20	Tanjung Kemuning
10	Kaur Utara	6.115,34	10	Simpang Tiga
11	Kinal	19.221,61	14	Gedung Wani
12	Kaur Tengah	2.579,82	8	Tanjung Iman
13	Kaur selatan	9.863,66	18	Bintuhan
14	Maje	38.200,62	18	Linau
15	Nasal	59.937,21	18	Merpas

Sumber: KKDA Kab. Kaur 2012

## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten kaur adalah 2,556 Km<sup>2</sup> atau 255.600 Ha dengan Luas Kawasan Laut mencapai 66.059 Ha atau 660,59 Km<sup>2</sup> dan Wilayah Daratan dengan Luas 2,556 Km<sup>2</sup> atau 255.600 Ha. Secara administratif Kabupaten kaur terdiri dari 15 Kecamatan 192 Desa. Penggunaan lahan di Kabupaten Kaur paling banyak di dominasi oleh hutan negara (TNBBS, Hutan Lindung Raja mendara, HPT/HP), kemudian perkebunan rakyat. Luas hutan pada data pertama mencapai 35% dengan Luas kabupaten Kaur 236.300 Ha, pada data kedua luas hutan mencapai 57% dengan luas Kabupaten Kaur 255.600 Ha. Kawasan hutan tersebut tersebar di Kecamatan Nasal, Maje, kaur Selatan, Tetap, Muara Sahung, Kinal, dan Padang Guci Hulu. Kecamatan yang memiliki luas huatn terluas yaitu kecamatan

Berdasarkan kedua data tersebut, pemanfaatan lahan di kabupaten kaur jauh melebihi standar minimum ketersediaan kawasan hutan 20% dari luas wilayah. Namun konversi lahan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya secara lingkungan sudah optimal. Penggunaan lahan yang dapat di konversi berupa pemanfaatan lahan yang tidak produktif seperti semak belukar luasnya mencapai 29.852,4 Ha.

Kabupaten kaur merupakan daerah perbukitan bergelombang dengan perbedaan ketinggian yang sangat besar, bervariasi antara 0 s.d > 1000 m di atas permukaan laut. Jalur pertama 3,31% dari luas wilayah terletak di ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut pegunungan Bukit-Barisan di bagian Utara-Timur laut. Pelurusan-pelurusan yang berarah Barat Laut-Tenggaradi bagian barat laut wilayah Kaur merupakan sesar orde satu dan orde dua pada ketinggian lajur bukit barisan. Aktifitas magmatik berikutnya pada akhir pilosin menghasilkan produk gunung api andesit-basalt (*QP*) yang menutupi sebagian wilayah peneylidikan paling utara.

### **3. Kondisi Demografi**

Kabupaten Kaur dan hasil pendataan Sensus Penduduk Tahun 2009 yang lalu jumlah penduduknya sebesar 106.256 jiwa yang terdiri dari 55.159 berjenis kelamin laki-laki dan 51.097 berjenis kelamin perempuan tiga Kecamatan paling banyak penduduknya berada di Kecamatan Nasal 14.935 penduduk, kecamatan kaur selatan 13.829 penduduk dan Kecamatan Maje sebanyak 11.719 penduduk, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Lungkang Kule dengan

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Kaur Tahun 2009**

No	Kecamatan	Total
1	Nasal	14.935
2	Maje	11.719
3	Kaur Selatan	13.829
4	Tetap	5.770
5	Kaur Tengah	4.298
6	Luas	4.749
7	Muara Sahung	5.362
8	Kinal	4.203
9	Semidang Gumay	5.316
10	Tanjung Kemuning	10.414
11	Kelam Tengah	6.095
12	Kaur Utara	6.324
13	Padang Guci Hilir	3.531
14	Lungkang Kule	3.183
15	Padang Guci Hulu	6.528
16	Kabupaten Kaur	106.256

**Sumber: KKDA Kab. Kaur 2012**

Apabila dilihat dari banyaknya penduduk perkecamatan, Kecamatan Nasal merupakan Kecamatan yang paling banyak penduduknya di Kabupaten Kaur yaitu sebanyak 14.935 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Lungkang Kule dengan penduduknya 3.183 jiwa.

#### **4. Pemerintahan**

Kabupaten Kaur dibentuk UU No 3 tahun 2003 yaitu tentang pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Bengkulu Selatan, Kaur dan Seluma. Sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Kaur menyelenggarakan pemerintahannya secara otonomi yang seluas-luasnya di tingkat Kabupaten.

Kabupaten Kaur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dari tahun ke tahun terus

mandiri, dengan menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur di Pimpin oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah dengan dibantu oleh Wakil Bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kabupaten kaur masa Bakti 2009-2014 terdiri dari 25 orang dari 7 fraksi.

#### **B. Partisipasi Politik Masyarakat Kaur Pada Pemilu Legislatif 2009**

Kabupaten kaur mempunyai jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 106.256 jiwa yang terdiri dari penduduk asli maupun pendatang. Pada Pemilu Legislatif 2009 dari jumlah penduduk tersebut ada sekitar 82.558 jiwa yang bisa menggunakan hak pilihnya dan telah terdaftar di KPU. Partisipasi politik di Kaur bisa dibilang masih kurang, meskipun pada kenyataannya masih banyak juga yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai jenis alasan baik alasan yang bersifat teknis maupun non teknis. Alasan teknis misalnya penduduk yang memang posisinya tidak sedang berada di Kaur atau yang tidak terdata untuk didaftarkan sebagai pemilih oleh KPU dan alasan non teknis misalnya penduduk yang memang dengan sengaja melakukan golput sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap para wakil rakyat. Dari jumlah pemilih yang terdaftar saja bahkan hanya 68.417 yang menggunakan hak pilihnya sementara sisanya sebanyak 14141 tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi instrumen politik seperti Partai Politik untuk lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Kaur,

meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum maka menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi. Masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam sebuah demokrasi. Untuk itu penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dengan keterlibatan masyarakat.

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik maka sudah selayaknya partai politik berbuat sesuatu yang dapat menumbuh kembangkan secara aktif partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, tidak hanya sibuk dalam kegiatan-kegiatan Partai politik itu sendiri. Dengan terjadinya hal tersebut, maka diharapkan nantinya akan ada perubahan ke arah perbaikan terutama yang bersangkutan dengan partisipasi politik masyarakat di Kabupetn Kaur.

**Tabel 2.3**

**Gambaran Partisipasi Politik di Kabupaten Kaur 2009**

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Daftar Pemilih	daftar yang Memilih
1	Dapil 1	45.594	37.451	30.176
2	Dapil 2	34.008	24.965	21.919
3	Dapil 3	26.654	20.142	16.322
4	Jumlah	106.256	82.558	68.417

Sumber: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur 2009

### **C. Gambaran Umum pemilihan Umum Anggota Legislatif Kabupaten Kaur 2009**

Sejak berdirinya kabupaten kaur pada tanggal 27 januari 2003 yang telah disahkan melalui undang-undang No.3 tahun 2003, Kabupaten Kaur baru dua kali melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu legislatif terakhir dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu.

Pada Pileg tahun 2009 tersebut munculnya konstelasi politik dikabupaten kaur dengan banyaknya partai-partai politik baru yang bermunculan. Sehingga partai-partai politik yang bersaing pada pemilu legislatif 2009 lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilu legislatif sebelumnya yaitu pada tahun 2004. Akan tetapi secara partisipasi politik pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2009 lebih rendah jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2004.

Daerah pemilihan kabupaten kaur pada pemilu legislatif 2009 meliputi 15 kecamatan dengan 3 Dapil yaitu:

- 1) Dapil satu meliputi kecamatan Lungkang Kule, Padang Gucu Ulu, Padang Guci ilir, Kaur Utara, Kelam Tengah, Tanjung Kemuning, Kinal, Semidang Gumay.
- 2) Dapil dua meliputi Muara Sahung, Luas, Kaur Tengah, Tetap, Kaur Selatan.
- 3) Dapil tiga meliputi Maje, Nasal.

Dapil satu merupakan dapil dengan jumlah pemilih terbanyak yang jumlahnya mencapai 30. 176 pemilih tetap dengan alokasi 11 kursi, dapil dua 21. 919 dengan alokasi 7 kursi dan dapil tiga 16.322 dengan alokasi 7 kursi.

Pada tanggal 9 april 2009 KPU secara sah mengumumkan hasil dari

pemilu legislatif yang telah dilaksanakan. Partai Golkar kembali menjadi pemenang

dengan 4733 suara dan mengantarkan 3 calegnya untuk duduk di dalam parlemen kemudian di ikuti oleh Demokrat dengan 4559 suara dan PDI di posisi ke tiga dengan 3322 suara.

Setelah diketahui hasil dari Pemilu legislatif 2009 tersebut di Kabupaten Kaur, dapat dilihat bahwa pemilu legislatif masih didominasi oleh partai-partai politik yang berideologi nasionalis, hal ini terbukti dengan masih dominannya partai-partai politik nasionalis dalam hal perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2009 yang memang mempunyai basis massa yang kuat dan figur-figur kadernya dengan tingkat kepopuleran yang tinggi di kabupaten kaur, meskipun tidak dapat dipungkiri kalau praktek-praktek money politik masih sangat dominan dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2009.

Dengan dominasi partai-partai politik berideologi nasionalis yang cukup kuat, ini mengindikasikan bahwa masyarakat kabupaten kaur lebih tertarik dengan partai nasionalis daripada partai-partai dengan ideologi religius maupun sosialis, partai politik yang berideologi religius tidak bisa bicara terlalu banyak meskipun penduduk Kaur didominasi oleh penduduk beragama islam. Hal ini mungkin Karena masih banyak penduduk kaur dari kalangan islam abangan yang takut akan banyak peraturan-peraturan islam yang mengekang mereka jika yang menguasai pemerintahan dari kalangan religius.

Kemenangan Partai Golkar untuk kedua kalinya pada Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Kaur mengisyaratkan bahwa masih besarnya kekuatan partai tersebut, Oleh karena Partai Golkar benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi partai-partai politik lain terutama di Kabupaten Kaur, dan bisa dibilang bahwa partai Golkar yang menjadi penguasa di Kabupaten Kaur saat ini



Fenomena yang terjadi tersebut memang tidak begitu mengherankan, karena nama partai Golkar yang memang sudah besar, ditambah kualitas kader-kader Golkar kaur yang merata serta tingkat kepopuleran yang tinggi dan masih banyaknya kalangan menengah ke bawah yang merindukan pemerintahan seperti Soeharto dulu yang notabene adalah seorang pemimpin Golkar yang dicintai petani dan kalangan masyarakat kelas bawah karena mampu mensejahterkan mereka terlepas dari kontroversi-kontroversi yang sudah dilakukan Soeharto.

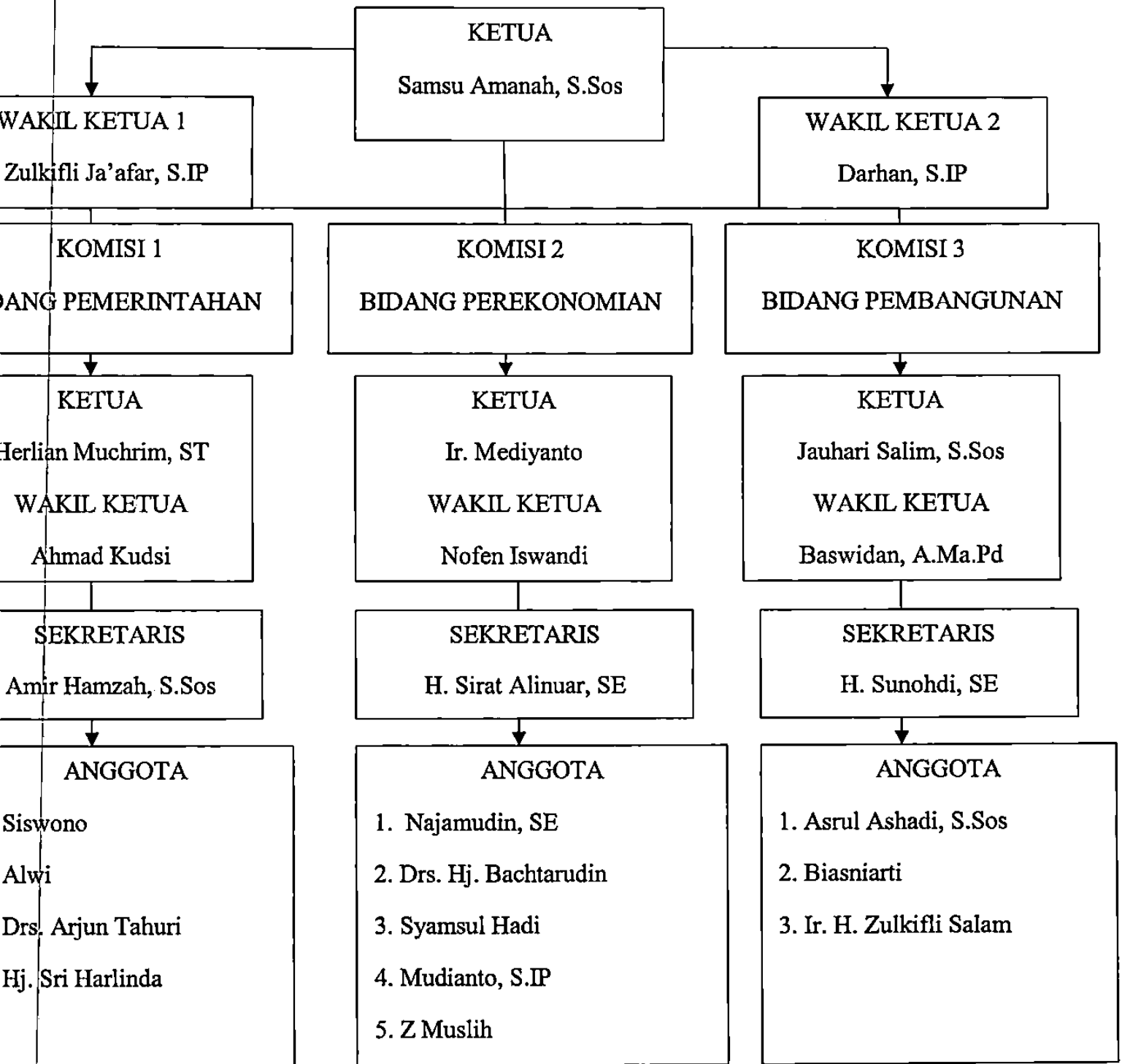
Itulah hal-hal yang menyebabkan masih cukup besarnya kekuatan partai Golkar sehingga dalam penerapan strateginya menjadi lebih mudah, bahkan Partai Demokrat sebagai partai yang menjadi penguasa pemerintahan pada saat itu tetap tidak mampu mengalahkan partai Golkar di Kabupaten Kaur meskipun mereka tetap menang dengan mendulang suara terbanyak di nasional.

Melihat fenomena pergolakan politik di Kabupaten Kaur dan elektabilitas partai Golkar beserta calonnya yang masih tinggi, sepertinya pemilu-pemilu legislatif kedepannya partai Golkar masih akan tetap bisa mendapatkan suara yang banyak dan akan terus menjadi pesaing berat bagi kompetitor-kompetitor lainnya.

Hasil dari pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Kaur mengantarkan 25 politisi untuk duduk di parlemen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, yang mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004.

Berikut struktur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

**Gambar 1.1**  
**Struktur DPRD Kabupaten Kaur Priode 2009-2014**



#### **D. Sejarah Perkembangan Partai Golkar**

Organisasi Ini didirikan pada tanggal 20 oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau disingkat Sekber Golkar. Sekber Golkar merupakan perhimpunan (federasi) 97 organisasi fungsional non afiliasi politik yang anggotanya terus berkembang hingga mencapai 220 organisasi. Setelah melalui Rakornas 1 (Desember 1965) dan Rakornas II (Nopember 1967) dilakukan pengelompokan organisasi berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok Induk Organisasi (KINO) yaitu; Kino Kosgoro, Kino Soksi, Kino MKGR, Kino profesi, Kino Ormas hankam, Kino Gakari, dan Kino Gerakan Pembangunan.

Untuk menghadapi pemilu 1971, 7 Kino yang merupakan kekuatan inti dari sekber Golkar tersebut pada tanggal 4 Februari 1970 mengeluarkan keputusan bersama untuk ikut menjadi peserta Pemilihan Umum melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya Logo yang menjadi tanda gambar Golkar sejak Pemilu 1971 tersebut tetap dipertahankan sampai sekarang melalui MUNAS I tanggal 4-10 September 1973 di Surabaya, dikukuhkan perubahan nama yang sebelumnya telah diputuskan musyawarah Sekber Golkar tanggal 17 juli 1971 di Jakarta yang menggunakan nama sebagai peserta Pemilu 1971. Dengan demikian Sekber Golkar yang semula merupakan Organisasi bersifat federatif dari golongan fungsional berubah menjadi Golongan Karya. Selanjutnya dari Pemilu ke Pemilu sejak tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Golkar terus menerus berhasil mengemban kepercayaan rakyat dengan memperoleh kemenangan sebagai mayoritas tunggal.

Setelah terjadinya gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa yang terjadinya peralihan Kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada B.J Habibie maka diadakan pembahasan beberapa undang-undang di bidang politik dengan

ditetapkan undang-undang yang baru tentang Partai Politik, Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tersebut maka tanggal 7 Maret 1999 telah dilaksanakan Deklarasi Partai Golongan Karya dan sejak saat itu secara resmi Golkar menegaskan diri menjadi Partai Politik dalam posisi yang sejajar serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Partai Politik lainnya. AD dan ART partai golkar yang baru sudah ditetapkan dalam MUNAS luar biasa pada tanggal 9-11 juli 1998 bersamaan dengan penetapan berbagai hasil munas Luar biasa kiranya sebagai manifestasi pembaharuan dalam tubuh golkar untuk tampil sesuai dengan tuntutan dan semangat reformasi.

Berdasarkan hasil Munas luar biasa tersebut, DPD partai golkar menegaskan paradigma baru Partai Golkar yang beirntikan misi, visi, dan platform perjuangan Partai Golkar dalam era reformasi. Partai Golongan Karya dalam paradigma baru dan diringkas sebagai **GOLKAR BARU** pada prinsipnya mengedepankan tema pokok perjuangannya dengan semboyan: **GOLKAR BARU, BERSATU UNTUK MAJU.**

Partai Golkar merupakan kekuatan politik pendukung utama rezim lama, orde baru, yang ditumbangkan oleh gerakan reformasi. Namun kekuatan politik ini mampu survive ketika terjadi transisi menuju demokrasi. Padahal, yang lazimnya terjadi di negara-negara yang mengalami transisi politik kasus di Indonesia juga ditandai dengan terjadinya pergolakan yang melibatkan berbagai kekuatan politik, baik yang berkuasa maupun yang berada di luar kekuasaan. Pergolakan politik

'hujatan' yang mendiskreditkan para politikus dan partai politik pendukung utama rezim otoritarian yang digulingkan.

Gerakan reformasi semakin menguat ketika krisis moneter yang terjadi pada juli 1997 tidak dapat segera diatasi, bahkan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensional dan akhirnya gagal ditangani oleh rezim Orde Baru. Padahal keberhasilan Pemerintah Orde Baru dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi sejak lama menjadi alat legitimasi Pemerintah, terutama dalam menghadapi tuntutan kelompok-kelompok pro-demokrasi, untuk segera melakukan prose keterbukaan politik. Terjadinya krissi ekonomi yang gagal ditangani rezim Soeharto tersebut menyebabkan tidak validnya keberhasilan ekonomi ini sebagai alat Legitimasi.

Kegagalan dalam menangani krisis moneter dan ekonomi itu membuat Soeharto dan Rezim Orde Baru yang dipimpinya menyerah pada tuntutan reformasi. Mahasiswa sdan masyarakat berhasil mendesak pimpinan DPR/MPR untuk meminta Soeharto, presiden yang telah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun tersebut, mundur dari jabatannya. Soeharto juga Ketua Dewan Pembina partai Golkar, sekaligus seorang purnawirawan militer yang kemudian ditetapkan sebagai Jenderal Besar, akhirnya mundur dari panggung politik pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa.

Posisi Soeharto segera digantikan oleh Wakil Presiden BJ. Habibie langsung memenuhi tuntutan rakyat dan kelompok pro-demokrasi untk menggelar Pemilu demokratis pertama era reformasi 1999. Meski telah mengakomodasi tuntutan politik kelompok-kelompok pro-demokrasi dan reformasi, pertanggung jawaban BJ. Habibie sebagai presiden ternyata ditolak oileh Majelis

Revisi... Melihat kenyataan tersebut, Habibie yang juga Ketua

Presidium Harian Dewan Pembina Golkar kemudian menyatakan tidak bersedia untuk dicalinkan kembali sebagai presiden.

Reformasi politik 1998 membalikkan situasi politik di Indonesia. Kepolitikan otoriter era Orde Baru digantikan oleh sistem politik yang demokratis era reformasi. Meskipun Soeharto menyerahkan jabatan presiden kepada BJ. Habibie, namun Soeharto gagal mewariskan struktur politik orde baru secara utuh kepada wakilnya itu. Struktur politik Orde Baru dan sistem kepartaian yang menempatkan Golkar pada posisi dominan tersebut kemudian runtuh bersama jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto.

Berhentinya Soeharto menjadikan Golkar sebagai organisasi politik terbesar pendukung Rezim Orde Baru, seakan kehilangan pegangan dalam haluan politiknya. Dalam beberapa saat lamanya, masyarakat sempat bertanya-tanya tentang keberadaan Golkar. Setelah itu politik mulai dialamatkan pada Golkar.

Bahkan berbagai kesalahan dan tuduhan mulai ditimpakan terhadap Golkar, yakni dianggap sebagai penyebab utama krisis. Di internal Golkar sendiri terjadi keretakan, dan organisasi ini seakan diambang kehancuran. Sejumlah pengamat, politikus, dan ilmuwan ketika itu membuat prediksi bahwa Golkar tidak akan mampu bertahan hidup dan akan segera menyusul runtuhnya kekuasaan Soeharto dengan Rezim Orde Barunya.

Golkar pada masa transisi politik seakan tanpa harapan dan banyak yang memastikan bahwa kekuatan politik ini tidak akan mampu bertahan hidup. Amien Rais, yang dikenal sebagai pakar politik, tokoh reformasi, Ketua Umum PAN dan kemudian terpilih menjadi Ketua MPR-RI periode 1999-2004, beberapa hari setelah mundurnya Soeharto pada akhir Mei 1998 meramalkan akan bubarnya

otomatis Golkar akan mengecil atau malah biasa bubar. Golkar sudah tidak ada pamornya dan pilar-pilar Golkar sudah hancur sehingga lebih baik membuka lembaran baru.

Mundurnya presiden Soeharto dan jatunya Rezim Orde Baru mengakibatkan Golkar sangat terpukul. Sistem politik dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Rezim Orde Baru dengan dukungan Golkar dibongkar dan bahkan dianggap kontra-reformasi. Golkar segera mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tahun 1998 untuk merespon perubahan politik yang terjadi. Munaslub yang memperebutkan posisi Ketua Umum Golkar tersebut menjadi ajang pertarungan politik paling keras sejak Golkar didirikan, karena melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan Soeharto. Soeharto sendiri sejak pengunduran dirinya tampak melepaskan tanggung jawabnya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar.

Sejalan dengan proses reformasi, pemilihan ketua umum Golkar pada Munaslub 1998 dimenangkan oleh kelompok-kelompok politikus sipil yang pro-reformasi, yakni Akbar Tandjung dengan mengalahkan Edi Sudrajat yang berasal dari lingkungan militer. Pilihan Golkar untuk mendukung reformasi itu sendiri bukan hal yang mudah. Perbedaan pandangan berlangsung sangat tajam diantara kelompok yang pro dan yang kontra-reformasi. Akibatnya, pasca munaslub 1998 Golkar dihadapkan pada sejumlah tantangan dan ancaman perpecahan organisasi, dengan keluarnya tokoh-tokoh dan pemisahan diri organisasi-organisasi yang dikenal sebagai pendukung Golkar. Sementara itu masyarakat beranggapan bahwa dukungan Golkar terhadap reformasi dinilai hanya pura-pura. Dengan demikian Golkar dihadapkan pada tantangan keras dari berbagai kelompok masyarakat,

... dan ... di masa lalu. Masyarakat beranggapan bahwa

kehancuran negara ini diakibatkan oleh Rezim Orde Baru, semua permasalahan yang ada baik masalah ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi menjadi tanggung jawab Partai Golkar dan para pendukungnya di masa kepemimpinan Soeharto. Karena itu masyarakat menghendaki agar Golkar dilarang ikut Pemilu 1999.

Ditengah-tengah tekanan politik yang keras tersebut, Golkar ternyata berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 1999. Demikian pula dalam pelaksanaan pemilu, meski prosesnya cukup menegangkan dan mencekam, akibat berbagai hujatan dan teror, Partai Golkar yang diyakini akan kehilangan banyak pendukungnya tersebut ternyata mampu mebalikkan anggapan yang berkembang dalam masyarakat dengan meraih dukungan suara terbesar ke dua pemilu 1999, setelah PDIP, partai Golkar dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut berhasil meraih suara 23.741.749 (22,4%) dan memperoleh 120 kursi di DPR.

Tekanan politik terhadap partai Golkar semakin menguat, bahkan usaha berbagai pihak yang mengarah pada upaya pembubaran partai politik ini semakin keras dilakukan, termasuk dengan cara kekerasan. Sungguhpun demikian, pada pemilu kedua era reformasi 2004, partai Golkar juga berhasil meraih dukungan suara terbesar dari para pemilih. Partai ini berhasil memperoleh suara terbanyak, yaitu 24,461.104 (21,58%) atau 129 kursi di DPR. Partai Golkar dengan demikian menjadi satu-satunya partai politik yang mendapatkan tambahan suara dibanding partai-partai besar seperti Pemilu lainnya, yaitu tambahan sebesar 710.355 suara



## **E. TUJUAN PARTAI GOLKAR**

Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945;

1. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati Kebenaran, Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **F. Visi dan Misi Partai Golkar**

Visi Partai Golkar adalah terwujudnya masyarakat Indonesia baru bersatu, berdaulat, maju, modern, damai adil, makmur, beriman dan bertakwa, berkesadaran hokum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tatanan masyarakat madani.

Misi partai golkar adalah:

- 1) Menegakkan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology bangsa demi meperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang denokratis dan berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur menegakkan supremasi hukum dan